



## BAB II

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

*Bab ini memuat kebijakan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bab ini memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terdiri dari :*

- A. Visi dan misi*
- B. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah*
- C. Strategi dan arah kebijakan daerah*
- D. Prioritas daerah.*

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan selama 5 tahun.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara kompetensi sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan dapat mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya,



membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD bersama dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan parameter penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) Dimana kita berada sekarang, (2) Kemana kita akan menuju, dan (3) Bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan '*bagaimana kita menuju ke sana*' dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju atas keadaan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan amanat publik. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 dengan rumusan :

***MENUJU TANJUNG JABUNG TIMUR SEJAHTERA, ADIL , MANDIRI, UNGGUL,  
DEMOKRATIS DAN AGAMIS  
(SAMUDRA)***

**Sejahtera** : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata.



- 
- Adil** : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Mandiri** : bahwa penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan tata pemerintahan yang baik.
- Unggul** : bahwa tatanan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor kehidupan. Produktifitas baik pemerintah dalam layanannya kepada masyarakat, hasil usaha masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil dan menengah yang mampu dikelola dengan standar global, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi yang memiliki nilai kompetitif atau berdaya saing secara local, nasional, regional dan internasional.
- Demokratis** : bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat dilandasi dengan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat sesuai dengan tatanan dalam negara hukum.
- Agamis** : bahwa kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang taat, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Guna mengoperasionalkan visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2011 – 2016, sebagai berikut :

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas)
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya



5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas)
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **1. Tujuan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan rumusan visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016, maka ditetapkan 9 (sembilan) tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun :

- 1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian masyarakat hingga wilayah terpencil.
- 2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berbasis kompetensi.
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 4) Mewujudkan roda perekonomian masyarakat dan struktur ekonomi yang kokoh yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif dan berdaya saing.
- 6) Menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan prinsip saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa dilandasi semangat kekeluargaan dan persaudaraan.
- 7) Mewujudkan penataan zona dan melestarikan kawasan perlindungan situs budaya tradisional sebagai pusat penelitian budaya, wisata budaya dan warisan budaya.
- 8) Terciptanya keselarasan, kedamaian, ketentraman dan jalinan persaudaraan antar umat beragama, antar suku, antar golongan masyarakat.
- 9) Tersedianya sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi sebagai media menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan.



## 2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Penuntasan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi
- 2) Terwujudnya perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa
- 3) Penyelesaian pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat
- 4) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi yang menghubungkan Delta Berbak (Muara Sabak Barat – Muara Sabak Timur - Rantau Rasau - Berbak - Nipah Panjang - Sadu)
- 5) Adanya dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik
- 6) Menunjang pengembangan Kawasan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Jambi.
- 7) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.
- 8) Peningkatan kualitas pendidikan (Perda Pendidikan Gratis Berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik)
- 9) Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
- 10) Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
- 11) Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-budget dan e-audit
- 12) Penataan wilayah Kecamatan dan desa/kelurahan
- 13) Penyiapan sistem perekrutan CPNS yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Tanjung Jabung Timur.
- 14) Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 15) Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji).
- 16) Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN
- 17) Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi.



- 18) Stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.
- 19) Membentuk BUMD yang dapat memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah.
- 20) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- 21) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.
- 22) Pengembangan potensi wisata dan kawasan desa wisata melalui promosi
- 23) Peningkatan produksi pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan) dan terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga
- 24) Pengelolaan sumberdaya alam migas dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal
- 25) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah
- 26) Pelayanan berobat gratis masyarakat yang lebih sederhana dan mudah dijangkau.
- 27) Ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap
- 28) Ketersediaan peralatan, obat-obatan dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas dan satelitnya.
- 29) Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
- 30) Kepemilikan lahan-lahan yang mengalami sengketa terutama sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
- 31) Melindungi fasilitas umum dan asset negara yang diakibatkan adanya sengketa lahan yang terjadi.
- 32) Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 33) Adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.
- 34) Adanya penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup



- 35) Perlindungan dan kepedulian kepada masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam.
- 36) Dukungan terhadap kehidupan beragama sampai ditingkat terbawah
- 37) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku
- 38) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial
- 39) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan demokratis.
- 40) Kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 41) Ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan.
- 42) Penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan
- 43) Penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah.
- 44) Pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah tingkat provinsi dan tingkat nasional.

## **C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

### **1. Strategi**

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dirumuskan strategi pembangunan. Dalam merumuskan strategi pembangunan harus memenuhi kriteria yang mencakup hubungan rasional antara Visi dan Misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih. Kemudian memperlihatkan hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun dan kemudian dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Untuk itu ditetapkan strategi pembangunan Tanjung Jabung Timur lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

#### **Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.**

- 1) Pengembangan sarana-prasarana diorientasikan sesuai strategi pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum.
- 2) Aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain.



- 3) Menekankan konsep agri bahari dalam pembangunan pedesaan.
- 4) Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan.
- 5) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan listrik.
- 6) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang merata.
- 7) Menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian terutama tanaman pangan.
- 8) Percepatan pembangunan jembatan yang menghubungkan Delta Berbak hingga Kawasan Ujung Jabung melalui *conccurent strategy* antara pemerintah pusat - provinsi – kabupaten.
- 9) Menyediakan dan meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 10) Memfasilitasi penyiapan lokasi sebagai kawasan ekonomi strategis.
- 11) Penyiapan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi strategis.
- 12) Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman.

**Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).**

- 1) Peningkatan penataan sistem pelayanan pendidikan untuk mencapai kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
- 2) Menyiapkan SDM yang terampil yang siap bekerja, untuk itu Balai Latihan Kerja (BLK) akan dilengkapi dengan sarana fasilitas pelatihan yang modern dan memadai.

**Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.**

- 1) Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi daerah.
- 2) Implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan potensi dan kemampuan
- 4) Peningkatan pelayanan terpadu kecamatan.
- 5) Penerimaan CPNS berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah.
- 6) Melakukan evaluasi kebutuhan berdasarkan beban kerja untuk mengetahui formasi CPNS setiap tahun.
- 7) Pelaksanaan rekrutmen CPNS yang didasarkan pada kebutuhan beban kerja dan bebas KKN.





- 8) Peningkatan Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai daerah, insentif guru PNS dan Non PNS, Honorer Daerah dan pejabat pemerintahan sampai ke tingkat RT).
- 9) Peningkatan insentif untuk guru PNS dan Non PNS daerah terpencil.
- 10) Pemberian insentif untuk pegawai SARA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 11) Pemberian penghargaan kepada pegawai SARA teladan.
- 12) Pembentukan Perda tentang pelayanan publik.
- 13) Penguatan lembaga pelayanan terpadu satu pintu/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
- 14) Membangun sistem komputerisasi e-KTP.
- 15) Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 16) Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.**

- 1) Menciptakan kondusifitas iklim investasi dan pendapatan daerah serta ekonomi daerah yang lebih baik.
- 2) Tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata.
- 3) Operasionalisasi dan permodalan BUMD dengan mitra strategis.
- 4) Menciptakan Pemenuhan Kecukupan pangan daerah.
- 5) Meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas.
- 6) Terselenggaranya upaya-upaya untuk penurunan tingkat pengangguran.
- 7) Menjadikan kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- 8) Menjadikan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
- 9) Peningkatan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna.
- 10) Peningkatan efisiensi, daya saing modernisasi serta nilai tambah komoditi tanaman pangan terutama padi, perkebunan dan kelautan.
- 11) Peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak dan air tawar serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.



- 12) Pembangunan sektor Migas dan Bahan Tambang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan.
- 13) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan melibatkan masyarakat
- 14) Pengelolaan migas dan bahan tambang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan kerusakan lingkungan dan fasilitas umum seperti infrastruktur sebagai bagian dari biaya produksi pengelolaan.
- 15) Pengelolaan lingkungan dilakukan secara bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan bencana alam.
- 16) Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing.

**Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).**

- 1) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan.
- 2) Menyediakan dan meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 4) Pendayagunaan sumberdaya yang ada baik berupa fasilitas infrastruktur kesehatan, perbekalan kesehatan dan tenaga kesehatan yang efektif.
- 5) Pemberian pelayanan yang maksimal bagi keluarga untuk menjadi Keluarga andalan.
- 6) Pendampingan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak.

**Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.**

- 1) Pemetaan sengketa lahan yang melibatkan pengusaha dan masyarakat.
- 2) Fasilitasi penyelesaian sengketa lahan secara musyawarah dan damai.

**Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.**

- 1) Penyampaian informasi dan pemberian pemahaman para pihak tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Fasilitasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Memotivasi masyarakat untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



- 4) Menindak setiap pelaku yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.**

- 1) Penyiapan bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Adanya sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT.
- 3) Peningkatan dan pembinaan generasi muda bidang keagamaan.
- 4) Pelestarian kesenian daerah yang berasal dari setiap suku budaya yang ada di daerah.
- 5) Adanya fasilitasi organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan dan kelompok masyarakat lainnya dalam melaksanakan kegiatan sosial.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyampaian aspirasi secara demokratis.
- 7) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar melalui institusi dan lembaga sosial secara transparan.

**Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.**

- 1) Meningkatnya ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Adanya pembinaan atlet sejak dini, berkala dan berkelanjutan.
- 3) Pemberian penghargaan bagi atlet daerah yang berprestasi.
- 4) Memfasilitasi pengembangan dan pendidikan pemuda/l Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional.

## **2. Arah Kebijakan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih adalah menitik beratkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah



kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Misi I : Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan Berkeadilan.**

- 1) Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi.
- 2) Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa.
- 3) Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar.
- 4) Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal.
- 5) Pengembangan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi darat dan sungai.
- 6) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu: penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan.
- 7) Pengembangan transportasi air (laut dan sungai) dengan memfokuskan pada pengembangan kapasitas pelabuhan serta pemeliharaan alur sungai.
- 8) Pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pergudangan dan pengolahan hasil pertanian.
- 9) Pengembangan infrastruktur perikanan seperti fasilitas pelelangan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pergudangan.
- 10) Pengembangan energi menciptakan alternatif dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan.
- 11) Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta kehandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan perdesaan.
- 12) Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
- 13) Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.



- 14) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi dengan menggunakan alat berat.
- 15) Membangun komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan provinsi dengan *inter-governmental networking policy*.
- 16) Menyempurnakan dan menyederhanakan pemberian izin usaha melalui sistem satu pintu.
- 17) Memfasilitasi investor dalam kemudahan berusaha dan pembebasan lahan.
- 18) Menyusun master plan pendukung pengembangan Kawasan Ujung Jabung yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan.
- 19) Pengembangan wilayah pertumbuhan.
- 20) Pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui bedah rumah.
- 21) Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan, desa dan pesisir.
- 22) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat.
- 23) Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.

**Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas).**

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan gratis untuk tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.
- 2) Meningkatkan pengaturan dalam bentuk perda tentang Sistem Pelayanan Pendidikan gratis bagi SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMU/ sederajat.
- 3) Meningkatkan kualitas lulusan dengan cara pemberian beasiswa untuk siswa SMU/ sederajat yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi.
- 4) Pendirian perguruan tinggi bidang ilmu yang relevan dengan potensi di Tanjung Jabung Timur.
- 5) Menyiapkan tenaga profesional yang berasal dari Tanjabtim untuk pendidikan Diploma III Perikanan dan Diploma lainnya.
- 6) Pemberian beasiswa berkelanjutan untuk keluarga tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.



- 7) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat untuk mengikuti pendidikan.
- 8) Peningkatan kualitas fasilitas pelatihan modern dan instruktur yang berkualitas di BLK.
- 9) Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat penyandang cacat untuk mengikuti kursus di BLK.

**Misi III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional.**

- 1) Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- 2) Penyempurnaan secara terus menerus implementasi *e-budget* dan *e-audit*.
- 3) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan anggaran berbasis *e-budget* dan *e-audit*.
- 4) Penataan kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan wilayah sangat terpencil, terpencil dan tidak terpencil.
- 5) Menetapkan kecamatan berbasis pelayanan terpadu melalui peraturan kepala daerah.
- 6) Penerimaan CPNS dengan memprioritaskan calon yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7) Formasi CPNS sesuai dengan beban kerja setiap SKPD.
- 8) Sistem recruitment CPNS yang bebas KKN.
- 9) TKD diberikan sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil - terpencil - tidak terpencil).
- 10) Insentif Guru ditingkatkan sesuai dengan kemampuan daerah.
- 11) Pemberian insentif bagi pegawai SARA di setiap desa/kelurahan.
- 12) Pemberian penghargaan bagi pegawai SARA teladan di setiap desa/kelurahan.
- 13) Perda pelayanan publik mampu meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan asli daerah.
- 14) KPPT berfungsi sebagai lembaga terpadu pelayanan publik.
- 15) Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan terpadu.
- 16) Sistem komputerisasi KTP terbangun di Kabupaten.
- 17) Pengembangan *e-Government*.
- 18) Pelayanan publik bebas dari KKN.

**Misi IV : Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya.**



- 1) Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus barang dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik.
- 2) Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap daerah lingkup Kabupaten Tanjab Timur.
- 3) Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.
- 4) Menjaga stabilitas perekonomian daerah yang dasari oleh capaian indikator ekonomi.
- 5) Menciptakan inovasi baru dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis pada agro industri dan agribisnis dengan mengedepankan IPTEK.
- 6) Memantapkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas) dalam pengelolaan BUMD.
- 7) Penguatan LKMP melalui bantuan kredit modal kerja.
- 8) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 9) Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.
- 10) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.
- 11) Peningkatan sistem kewaspadaan dini gizi dan pangan.
- 12) Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
- 13) Mengembangkan UKM dengan pendekatan klaster pada sektor agribisnis dan agroindustri yang didukung adanya pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
- 14) Mengembangkan UKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
- 15) Meningkatkan sistem dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.



- 16) Mendorong perkuatan struktur industri pada sub-sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif.
- 17) Memperluas akses masyarakat, terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha.
- 18) Pengembangan Koperasi yang handal.
- 19) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian di perdesaan melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas suplai berbasis sumber daya lokal.
- 20) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi.
- 21) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out-sourcing, pengupahan, PHK serta jaminan keselamatan kerja.
- 22) Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan wawasan kerja.
- 23) Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 24) Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata, terutama yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
- 25) Peningkatan, pengembangan dan pelestarian objek wisata daerah dengan peran serta pelaku usaha dan masyarakat.
- 26) Pembangunan pertanian diarah pada pemanfaatan lahan berdasarkan potensi agronomis sehingga menjamin produktifitas lahan dan kepentingan strategis.
- 27) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terutama pada ke fungsi penggunaan lain terutama pada kawasan yang secara agronomis sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan.
- 28) Memberikan bantuan fasilitas dan peralatan produksi pertanian, permodalan, subsidi, kompensasi dan regulasi yang memihak petani tanaman pangan.
- 29) Penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.
- 30) Penguatan kemampuan teknis budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, peningkatan kemampuan manajerial dan penguatan daya saing serta posisi tawar petani.
- 31) Penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial petani, peternak dan nelayan dilakukan melalui peningkatan kemampuan berorganisasi secara partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi.
- 32) Peningkatan nilai tambah produk pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.





- 33) Peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam penangkapan ikan laut.
- 34) Peningkatan produksi perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya perikanan darat.
- 35) Peningkatan sarana dan prasarana nelayan melalui pemberian bantuan pompong dan perlengkapan alat tangkap.
- 36) Pengelolaan migas dan bahan tambang harus diarahkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari secara ekonomi, sosial dan ekologi.
- 37) Pembangunan dan pengelolaan migas dan bahan tambang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan pengelolaan.
- 38) Membuat kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhitungkan dampak-dampak terhadap lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 39) Membangun kesadaran semua pengelola sumberdaya alam migas dan bahan tambang akan dampak yang bisa timbul dari kegiatan eksploitasi dan transportasi hasil pengelolaan.
- 40) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
- 41) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
- 42) Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal.
- 43) Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya.

**Misi V : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).**

- 1) Memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan terutama untuk perdesaan dan wilayah terpencil.
- 2) Memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.



- 3) Memenuhi rasio tenaga kesehatan yang memadai sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.
- 4) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara simultan terutama memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di perdesaan dan wilayah terpencil.
- 5) Pendayagunaan kemampuan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu pada masing-masing kecamatan dan desa.
- 6) Pembinaan masyarakat pada program Keluarga Berencana.
- 7) Pelayanan Kontrasepsi.
- 8) Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga miskin.
- 9) Pendampingan pelayanan kesehatan keluarga dan anak.
- 10) Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

**Misi VI : Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat.**

- 1) Kejelasan posisi para pihak dalam sengketa lahan.
- 2) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan.
- 3) Terbentuknya lembaga penyelesaian sengketa lahan.
- 4) Terbentuknya kesepakatan bersama tentang mekanisme dan tata cara.

**Misi VII : Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.**

- 1) Terciptanya penataan sistem informasi kawasan konservasi, peninggalan situs budaya dan pengembangan budaya tradisional.
- 2) Pemetaan zonasi kawasan konservasi.
- 3) Tindakan tegas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kawasan konservasi dan kawasan perlindungan.
- 4) Meningkatkan sikap dan tindakan positif para pihak untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup setiap tahun.
- 5) Meningkatnya motivasi para pihak untuk menjaga lingkungan.
- 6) Meningkatnya sikap tegas pemerintah daerah untuk penerapan sanksi kepada pelaku kerusakan lingkungan hidup.

**Misi VIII : Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.**

- 1) Pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam pada kondisi tanggap darurat dan pasca bencana.
- 2) Sosialisasi dan pembinaan kerukunan beragama secara berkelanjutan sampai ke tingkat RT oleh aparat yang berwenang dengan melibatkan tokoh masyarakat.



- 3) Pembinaan generasi muda melalui lembaga keagamaan.
- 4) Pelestarian kesenian tradisional.
- 5) Terwujudnya pengembangan wisata bahari dan wisata religi.
- 6) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan partisipasi masyarakat.
- 8) Penyiapan media penyaluran aspirasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 10) Meningkatkan kualitas manajemen dan sumberdaya manusia pelayanan kesejahteraan sosial.
- 11) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
- 12) Meningkatnya mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.

**Misi IX : Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlet untuk berprestasi.**

- 1) Pengembangan fasilitas olah raga berkualitas di setiap kecamatan.
- 2) Pembinaan generasi muda sejak dini untuk menjadi atlet sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Penyiapan anggaran bagi atlet daerah yang berprestasi sesuai dengan keuangan daerah.
- 4) Pembinaan pemuda/i Tanjabtim untuk menjadi Qori dan Qori'ah berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional

**D. PRIORITAS DAERAH**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2011-2016, sebagai berikut :

- 1 Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan, dengan fokus :



- 
- a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan, pemanfaatan transportasi sungai, pelabuhan serta infrastruktur Listrik.
  - b. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan mewujudkan tersedianya Air Bersih layak minum.
  - c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ekonomi seperti pasar, tempat pelelangan dan infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas, dengan fokus :
- a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas
  - b. Pemerataan jangkauan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas
  - c. Peningkatan pendidikan gratis yang berkualitas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA..
  - d. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan kejuruan, terutama pendidikan kelautan dan perikanan serta pengembangan ternak.
  - e. Peningkatan Kualitas Layanan dan akses perpustakaan di semua wilayah dan lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumberdaya manusia yang profesional, dengan fokus :
- a. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik
  - b. Peningkatan Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum
  - c. Mendorong pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja pada semua SKPD dan level Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - d. Peningkatan kompetensi birokrasi sehingga dapat bekerja lebih profesional.
  - e. Peningkatan Kesenjangan Gender.
- 4 Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa, dengan fokus :
- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian perkebunan, perikanan, dan kelautan perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan.
  - b. Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
  - c. Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing.
  - d. Pengembangan usaha agroindustri.



5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas) dengan fokus:
  - a. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan kesemua wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang prima bagi semua penduduk.
  - c. Meningkatkan pelayanan berobat gratis yang berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan.
6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat, program ini fokus pada:
  - a. Identifikasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  - b. Membantu dan memfasilitasi permasalahan sengketa lahan yang terjadi ditengah masyarakat terutama permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan.
  - c. Menyelesaikan dengan cepat penyelesaian sengketa lahan dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional, dengan fokus :
  - a. Penataan kembali zonasi dan perlindungan kawasan konservasi dengan tegas dan konsisten berdasarkan hukum untuk menjaga lingkungan hidup yang baik.
  - b. Penataan dan perlindungan terhadap peninggalan budaya dan situs baik yang sudah ada maupun yang sedang dalam proses.
  - c. Peningkatan dan pengembangan budaya tradisional melalui berbagai kegiatan, kajian dan event yang mendorong pengembangan budaya.
8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan fokus:
  - a. Peningkatan peran agama dalam mendorong kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang lebih dinamis.
  - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
  - c. Meningkatkan toleransi beragama yang lebih harmonis ditengah masyarakat.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan atlit untuk berprestasi, dengan fokus:
  - a. Membangun fasilitas olahraga yang representatif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olah raga.
  - b. Meningkatkan pencarian atlit olah raga yang berbakat terutama di tingkat SD, SMP dan SLTA.



- c. Meningkatkan pembinaan atlet untuk berprestasi dan bagi yang berprestasi diberikan beasiswa sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
- d. Peningkatan Peran Pemuda untuk mendorong Prestasi Olahraga

Dari prioritas dan arah kebijakan yang ditertuang dalam RPJM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2016. Maka untuk prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.



Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isustrategis daerah.

Dari ulasan tersebut diatas, maka didapat 9 prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan
2. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's)
3. Infrastruktur
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup
9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

**Tabel 2.1**  
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2014
I.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas)</li> <li>3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional.</li> <li>4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>2. Pencapaian MDG'S</li> <li>3. Infrastruktur</li> <li>4. Pendidikan</li> <li>5. Kesehatan</li> <li>6. Ekonomi Kerakayatan</li> <li>7. Penanggulangan Kemiskinan</li> <li>8. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup</li> <li>9. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga</li> </ol>



	6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi.	
--	--	--

### 1. Tata Kelola Pemerintahan

- 1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja SKPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
- 3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merried* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
- 4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas di daerah *remote area*.

### 2. Infrastruktur

- 1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur-Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
- 2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
- 3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
- 4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
- 5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
- 6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
- 7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

### 3. Pendidikan

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;





- 2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
- 3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
- 4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK / sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
- 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- 6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
- 7) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
- 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;
- 9) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- 10) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan berbak;
- 11) Perlakuan khusus untuk sekolah di remote area (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
- 12) Pemantapan tatakelola BOS sehingga efisien dan efektif;
- 13) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
- 14) Peningkatan status sekolah (SD berbasis IT, RSSN, SSN, RSBI, SBI);
- 15) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 16) Meningkatkan APM SD/sederajat menjadi sebesar 94,60 %;
- 17) Meningkatkan APM SMP/sederajat menjadi sebesar 79,56 %;
- 18) Meningkatkan APK SMA/sederajat menjadi sebesar 76,00 %;
- 19) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
- 20) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

#### **4. Kesehatan**

- 1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
  - a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 90 persen;
  - b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;



- c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
  - d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
  - e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
  - f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
  - g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70%;
  - h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70%;
  - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- 2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 %;
  - 3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
  - 4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
    - a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
    - b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
  - 5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
  - 6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;
  - 7) Penyusunan PERDA tentang kesehatan.

## **5. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan**

- 1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
- 2) Penguatan modal, saprodi dan komposter;
- 3) Mempersiapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perangkat terkait dengan Implementasi Undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan



- peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
- 5) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
  - 6) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
  - 7) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
  - 8) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
  - 9) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
  - 10) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
  - 11) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan instruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;
  - 12) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
  - 13) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
  - 14) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
  - 15) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
  - 16) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
  - 17) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
  - 18) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
  - 19) Pengembangan usaha agroindustri;
  - 20) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
  - 21) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2013 sebesar 91,75 %;
  - 22) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 sebesar 6,37.

## **6. Penanggulangan Kemiskinan**



- 1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
- 2) Menggerakkan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
- 3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.
- 4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
- 5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
- 6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

## **7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup**

- 1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
- 2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
- 4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

## **8. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga**

- 1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di bidang kesehatan dan pendidikan serta PERDA pembentukan Unit Pelayanan Teknis, serta Perda-Perda lain;



- 2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
- 3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
- 4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
- 5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
- 6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site ([www.tanjabtimkab.go.id](http://www.tanjabtimkab.go.id));
- 7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olah prestasi;
- 8) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan "Sister City";
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
- 10) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.